



Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN SRAGEN
Jl. Ra. Kartini. No. 8 Sragen
Telp. (0271) 891043**

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sragen tahun 2025 dapat terselesaikan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen atas dasar usulan dan program dari setiap bidang dan seksi serta usulan dari berbagai pihak. Perubahan Rencana kerja ini merupakan tahun ke empat dari pelaksanaan Renstra 2025-2029.

Perubahan Rencana kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun anggaran 2025 serta untuk mereview hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Perubahan Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi Instansi maupun pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2025, serta sebagai bahan acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya. Terima Kasih.

Sragen, 29 Juli 2025

Pt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SRAGEN



Dra. YUNIARTI, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19670620 199403 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL.....iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum..... 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 5

 1.4. Sistimatika Penulisan.....5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL
KABUPATEN SRAGEN SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025..... 7

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025..... 7

 2.3. Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sragen 29

 2.4. Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Dinas Penelaahan Usulan Program
 dan Kegiatan Masyarakat 37

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 39

 3.1. Rencana Kerja 39

 3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sragen..... 47

BAB IV P E N U T U P 49

 4.1 Catatan Penting 49

 4.2 Kaidah Pelaksanaan..... 49

 4.3 Rencana Tindak Lanjut..... 50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Sragen Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen (Triwulan I) Periode Pelaksanaan : Tahun 2025	12
Tabel 2.2 Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
Tabel 2.3 Pencapaian Perubahan Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sragen.....	29
Tabel 2.4 Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Sragen	38
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Sragen.....	40
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Sragen.....	47
Tabel 3.3 48Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Kabupaten Sragen.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah perubahan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029. Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sragen merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025. Perubahan Renja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah untuk memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

Mencermati pula RPJMD dalam RKPD 2025, Urusan Sosial sesuai dengan kewenangan Kabupaten Sragen memiliki 6 indikator kinerja pembangunan terdiri atas (1) Persentase Program Pemberdayaan Sosial, (2) Persentase Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, (3) Persentase Program Rehabilitasi Sosial, (4) Persentase Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, (5) Persentase Program Penanganan Bencana, (6) Persentase Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Oleh karena itu kegiatan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sragen harus memiliki prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan suasana keamanan dan kenyamanan yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial

perlu dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran program yang mendukung **“Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong”** sebagaimana dimaksud di dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025- 2029.

Dinas Sosial Kabupaten Sragen sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis urusan wajib bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Prinsipnya membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri dan semangat Tat Twan Asi (aku adalah engkau dan engkau adalah aku) telah menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berorientasi pada proses memanusiakan manusia sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara mandiri bagi kesejahteraan hidupnya.

Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sragen adalah semakin berkurangnya populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berbasis masyarakat, melalui pelayanan kesejahteraan sosial yakni Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Penanganan Fakir Miskin.

Berangkat dari komitmen diatas, maka program kegiatan harus disusun dalam suatu musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan stakeholder dan masyarakat, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan terukur dengan baik.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2014 tentang Kementrian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementrian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Manteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 2017 Nomor 1125);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, Sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
21. Peraturan Daerah kabupaten Sragen Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
23. Peraturan Bupati Sragen No. 13 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Berita daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 Nomor 13)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah dalam rangka penyediaan untuk penyesuaian Perubahan Rencana Kerja 2025 bagi Dinas Sosial Kabupaten Sragen dengan tujuan :

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 lebih terarah, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan jangka menengah yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029;
2. Pencapaian target Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 dapat lebih terukur dan lebih optimal;
3. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan fokus pada pemecahan masalah yang mendasar
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sementara tujuan penyusunan perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 meliputi rencana sasaran, target capaian kinerja, pagu indikatif serta sumber dananya;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025;
3. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana Pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Sragen baik tahunan maupun lima tahunan;.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; maksud dan tujuan; dasar hukum penyusunan; serta sistematika Renja

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra perangkat daerah dan disertai dengan langkah-langkah strategis pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat pagu, indikator kinerja program hasil/outcome), kegiatan(Keluaran/output) dan Subkegiatan (keluaran/output) dalam rangka pencapaian Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB IV: PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN
SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk Meningkatkan taraf Kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial di prioritaskan kepada mereka yang memiliki kriteria masalah yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketuna sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. PKH (Program Keluarga Harapan) sebanyak 44.678 KPM, Tersalur di Triwulan I sebanyak 44.485 KPM Bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan cara transfer langsung oleh Bank Himbara ke Rekening masing-masing KPM;
2. Proses pencairan dilakukan di E-Warong/ATM dan diambil secara Tunai;
3. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sebanyak 64.575 KPM, Terealisasi di Triwulan I sebanyak 64.372, Bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan cara transfer langsung oleh Bank Himbara ke Rekening masing-masing KPM. Proses pencairan dilakukan di E-Warong yang telah terdaftar dan dibelanjakan/ditukarkan dengan bahan pangan Sembako sesuai Ketentuan, dan besaran bantuannya adalah 200.000/KPM;
4. PBI (Penerima Bantuan Iuran) sebanyak 317.765 KPM dalam bentuk pelayanan kesehatan;
5. KJS (Kartu Jateng Sejahtera) Sebanyak 286 KPM terealisasi di Triwulan I sebanyak 284 KPM;
6. Bantuan kepada 159 KRSE masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- rupiah;
7. Bantuan Kepada Lanjut Usia Terlantar sebanyak 175 orang (dari total lansia sebanyak 1.148 orang) masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 rupiah. Secara umum melihat kondisi lansia di Kabupaten Sragen, diperlukan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut peduli dan berpartisipasi dalam mengurus lansia terlantar karena permasalahan sosial lansia adalah tanggung jawab bersama;

8. Bantuan Modal Usaha kepada Penyandang Disabilitas sebanyak 25 Orang masing-masing sebesar Rp. 2.500.000 rupiah;
9. Bantuan Modal usaha untuk Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran bermasalah sebanyak 30 Orang, masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,-;
10. Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Berat sebanyak 50 Orang (dari Total 6.592 orang) masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 rupiah.
11. Untuk gelandangan sakit menjadi kewenangan dinas kesehatan hal ini RSUD, Dinas Sosial Kabupaten Sragen memberikan jaminan pembebasan jaminan kesehatan dengan surat rekomendasi dari kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen;
12. Koordinasi kepada masyarakat lingkungan untuk ikut peduli dan berpartisipasi dalam mengurus lansia terlantar karena permasalahan sosial lansia adalah tanggung jawab bersama.

Sedangkan Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Sosial pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya jenis PPKS yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Sragen tidak sebanding dengan alokasi anggaran;
2. Kesulitan dalam mendapatkan data by address yang valid dan akurat;
3. Kurang Optimalnya jaringan kerja antar sektor terkait dalam penanganan masalah Tuna Sosial dan KPO;
4. Kurangnya peran serta masyarakat/Orsos dalam penanganan masalah Tuna Sosial, hal tersebut terlihat dari masih belum semua kecamatan mempunyai LKS yang menangani masalah Tuna Sosial dan KPO;
5. Regulasi dari Kementrian Sosial yang sering berubah-ubah;
6. Aksesibilitas data DTKS dan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) di berikan kepada Penerima Bantuan Sosial tidak melalui Dinas Sosial Kabupaten Sragen, melainkan melalui Bank Himbara;
7. Tingginya jumlah PPKS di Kabupaten Sragen sebanyak 30.002 Orang tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sragen;
8. Penduduk miskin dengan kondisi keterlantaran dan tidak potensial;
9. Karakteristik masyarakat miskin yang cenderung mempunyai sikap mental pasrah, merasa nyaman dengan bantuan sosial yang selama ini diterima;
10. Ketegasan dari pengambil kebijakan terutama di tingkat desa yang merasa enggan mengeluarkan warga dari data kemiskinan dengan berbagai faktor seperti kedekatan, unsur politis dan lainnya;
11. Masih terjadinya ketidaktepatan sasaran beberapa program perlindungan dan

12. Bantuan sosial berdasarkan sumberdata Kemensos melalui SIKS-NG
13. Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah dan Kabupaten/kota: Verifikasi dan Validasi data Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sragen, sesuai data DTKS 146.476 RUTA atau 364.334 Orang;
14. Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah dan Kabupaten/kota : Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus di input dari tingkat desa/kelurahan di Aplikasi SIKS-NG tetapi yang belum Optimal;
15. Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga ke Panti Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang kondisinya padat karena kelebihan kuota daya tampung berdampak terlambatnya penyaluran Tuna Sosial dari Kabupaten;
16. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spritual dan Sosial : Masih rendahnya aksesibilitas perlindungan sosial yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial;
17. Kegiatan khusus bagi kelompok Rentan adalah Bencana Alam tidak dapat diprediksi baik waktu,tempat , lokasi dan besarnya bencana.

Untuk mengatasi hal tersebut untuk mencapai sasaran kinerja tahun yang akan datang ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Dalam hal penanganan PGOT Dinas Sosial Kabupaten Sragen hanya menangani pergelandangannya namun untuk kesehatan jiwa menjadi kewenangan Dinas Kesehatan sedang mengamuk menjadi kewenangan trantib atau polsek setempat. Sehingga masih dibutuhkannya pemahaman antar OPD untuk hal tersebut;
2. Untuk gelandangan sakit menjadi kewenangan dinas kesehatan hal ini RSUD, Dinas Sosial memberikan jaminan pembebasan jaminan kesehatan dengan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen;
3. Meningkatnya jumlah penerimaan anak jalanan di rumah singgah sebagian besar berasal dari wilayah jawa timur dan tidak sedikit anak-anak sragen yang ikut terjaring mengingat Sragen wilayah perbatasan sehingga akses pengaruh lingkungan terhadap anak jalanan semakin besar
4. Banyaknya permasalahan sosial anak termasuk ABB, akan tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual anak dengan HIV/Aids, anak korban kekerasan fisik, mental dan anak dalam situasi rentan yang perlu penanganan dan pendampingan, serta memerlukan rumah aman baik untuk korban maupun pelaku anak sedangkan di Kabupaten Sragen belum mempunyai rumah aman
5. Penyandang disabilitas sejumlah 6.533 jiwa, untuk lebih diberikan asistensi agar produktif

6. Perlunya dilakukan evaluasi kegiatan setiap bulan untuk pencapaian target triwulan sesuai dengan yang direncanakan

Review capaian kinerja kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 pada triwulan I dalam Renstra Dinas Sosial dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong :

1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spritual dan Sosial : Pemanfaatan Alat Beometrik sangat membantu proses Rujukan dan Reunifikasi bagi penerima manfaat;
2. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga : Panti Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang kondisi nya padat karena kelebihan kuota daya tampung berdampak terlambatnya penyaluran Tuna Sosial dari Kabupaten
3. Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar : Verifikasi terhadap 150 Calon = Penerima Manfaat /Bantuan;
4. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota : Program Keluarga Harapan (PKH) Reguler : Uang Tunai via Bank Himbara (BNI 46), dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pengambilan bisa di ATM dan melalui kantor pos, besaran sesuai komponen dalam keluarga tersebut;
5. Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah dan Kabupaten/kota: Verifikasi dan Validasi data Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sragen, sesuai data DTSEN 146.476 RUTA;
6. Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah dan Kabupaten / kota : Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus di input dari tingkat desa/kelurahan di Aplikasi SIKS-NG tetapi yang belum Optimal;
7. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota : Keluarga Rawan Sosial Ekonomi : Mengadakan Verifikasi dan validasi Data;
8. Program Keluarga Harapan (PKH) Reguler : Uang Tunai via Bank Himbara (BNI 46) setiap 3 bulan sekali, dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pengambilan bisa di ATM, dan melalui kantor pos besaran sesuai komponen dalam keluarga tersebut.
9. Masih banyak kekurangan di fitur aplikasi SIKS-NG sehingga menyulitkan operator saat melakukan verifikasi dan validasi data baik DTSEN maupun BSP

10. Tidak adanya file excel dari aplikasi sehingga menyulitkan operator ketika merekap data dan memadupadankan dengan file BNBA penerima Bantuan Sosial;
 11. Operator SIKS-NG tidak memiliki keleluasaan dalam edit data di aplikasi SIK-NG;
 12. Masih banyak data KPM yang tidak sesuai antara data kependudukan dan data di aplikasi sehingga harus mengulang verifikasi dan validasi di lapangan.
- b. Faktor Penghambat :

Isu Dinas Sosial Kabupaten Sragen cenderung menghadapi berbagai masalah Sosial dengan berbagai ragam variabel yang mempengaruhi, sehingga ruang lingkup kajian di bidang sosial semakin berkembang. Secara umum kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sragen sebagai pelayan masyarakat di daerah, sangat dipengaruhi oleh SDM Dinas Sosial Kabupaten Sragen dan dukungan anggaran dalam menyusun suatu dokumen.

Output dari urusan Sosial menurut Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) . Bahwa secara garis besar ke 3 produk dokumen tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen melalui penyusunan RPJPD, Revisi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sragen tahun 2021-2026.

Tingkat capaian kinerja yang bersifat rutin relative menunjukkan kinerja yang cukup baik diukur dari tingkat out come / output program dan kegiatan diantara 90% – 100%. Dari evaluasi capaian indikator sasaran RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 Triwulan I tersebut diatas sebagaimana tabel 2. 1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Sragen
Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen (Triwulan I)
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Faktor	Tindak Lanjut
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) miskin yang ditangani	Persen	90	88	[Pendorong] Kabupaten Sragen menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah yaitu, BNPT, PKH, YAPPI, RTS, Permakanan Lansia, Pena, PBI, KJS	Memperkuat sinergitas dan kerjasama internal Dinas Sosial serta seluruh potensi kesejahteraan sosial yang dimiliki dengan tekad dan semangat yang sama untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial secara paripurna
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Persen	78	74	[Pendorong] Komitmen kelembagaan tingkat daerah sampai desa/kelurahan termasuk dukungan pihak swasta	Memperluas kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya peningkatan usaha ekonomi produktif baik dari segi permodalan, pelatihan dan pendampingannya

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				I							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)						100,00	20,00				
Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)						89,33					
Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)						83,76					
Dinas Sosial											

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
						I					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.359.699.621		3.467.572.825		19,97		
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			17.359.699.621		3.467.572.825		19,97		
1.06.01	Tercapainya pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]	100,00	6.959.391.279	25,00	1.612.683.525	25,00	23,17	[TW1 - Pendorong] Program tersebut merupakan pemenuhan kegiatan rutin kantor, untuk capaian fisik mengikuti kebutuhan per bulan	[TW2] Program dilaksanakan sesuai anggaran kas
1.06.01.2,01	Tersusunnya Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu [Dokumen]	7,00	33.500.000	3,00	9.967.000	42,86	29,75	[TW1 - Pendorong] Kegiatan tersebut merupakan pemenuhan kegiatan rutin kantor, untuk capaian fisik mengikuti kebutuhan per bulan	[TW2] Kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran kas
1.06.01.2,01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [Dokumen]	2,00	10.000.000	1,00	4.342.000	50,00	43,42	[TW1 - Pendorong] Kegiatan sudah berjalan untuk renja penetapan tahun 2025	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.01.2,01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD [Dokumen]	1,00	5.000.000	1,00	2.450.000	100,00	49,00	[TW1 - Pendorong] Kegiatan sudah berjalan	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.01.2,01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [Laporan]	4,00	18.500.000	1,00	3.175.000	25,00	17,16	[TW1 - Penghambat] Kegiatan di Laksanakan di Bulan April	[TW2] Optimalkan, karena masih sangat rendah capaiannya
1.06.01.2,02	Tersusunnya Laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah [Laporan]	12,00	5.324.841.473	3,00	1.437.262.514	25,00	26,99	[TW1 - Pendorong] Kegiatan tersebut merupakan pemenuhan kegiatan rutin kantor, untuk capaian fisik mengikuti kebutuhan per	[TW2] Kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran kas

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
						I					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										bulan	
1.06.01.2,02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	35,00	5.314.841.473	35,00	1.430.662.514	100,00	26,92	[TW1 - Pendorong] Gaji direalisasikan setiap bulan	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.01.2,02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [Dokumen]	5,00	5.000.000	2,00	3.300.000	40,00	66,00	[TW1 - Pendorong]Kegiatan sudah berjalan	[TW2]Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.01.2,02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD [Laporan]	5,00	5.000.000	2,00	3.300.000	40,00	66,00	[TW1 - Pendorong] Kegiatan sudah berjalan	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.01.2,05	Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dikerjakan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dikerjakan [Dokumen]	1,00	5.000.000	1,00	0	100,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Kegiatan tersebut merupakan pemenuhan kegiatan rutin kantor, untuk capaian fisik mengikuti kebutuhan per bulan	[TW2] Kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran kas
1.06.01.2,05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian [Dokumen]	1,00	5.000.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Kegiatan belum dilaksanakan	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.01.2,06	Tersusunnya Laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah [Laporan]	12,00	160.000.000	3,00	32.159.000	25,00	20,10	[TW1 - Pendorong] Kegiatan tersebut merupakan pemenuhan kegiatan rutin kantor, untuk capaian fisik mengikuti kebutuhan per bulan	[TW2] Kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran kas

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
						I					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.01.2,06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	12,00	5.000.000	3,00	3.044.000	25,00	60,88	[TW1 - Pendorong] Pencairan sesuai dengan anggaran kas	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.01.2,06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	12,00	15.000.000	3,00	4.904.000	25,00	32,69	[TW1 - Pendorong] Pencairan sesuai dengan anggaran kas	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.01.2,06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	12,00	25.000.000	3,00	10.710.000	25,00	42,84	[TW1 - Pendorong] Menyesuaiikan dengan kebutuhan tamu	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.01.2,06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	12,00	15.000.000	3,00	4.354.000	25,00	29,03	[TW1 - Pendorong] Pencairan sesuai dengan anggaran kas	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.01.2,06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	12,00	100.000.000	3,00	9.147.000	25,00	9,15	[TW1 - Penghambat] Menyesuaian undangan rapat yang ada	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.01.2,07	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang [Unit]	14,00	473.531.400	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Pembelian belanja modal melalui E-kataolg	[TW2] Melaksanakan kegiatan sesuai anggaran kas
1.06.01.2,07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	1,00	385.000.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Pembelian Belanja Modal sesuai E-Katalog	[TW2] Optimalkan, karena masih sangat rendah capaiannya
1.06.01.2,07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan [Unit]	13,00	88.531.400	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Pembelian Belanja Modal sesuai E-Katalog	[TW2] Optimalkan, karena masih sangat rendah capaiannya
1.06.01.2,08	Tersusunnya laporan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah [Laporan]	12,00	266.000.000	3,00	61.528.511	25,00	23,13	[TW1 - Pendorong] Kegiatan tersebut merupakan pemenuhan kegiatan rutin kantor, untuk capaian fisik mengikuti kebutuhan per	[TW2] Kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran kas

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
						I					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										bulan.	
1.06.01.2,08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	12,00	90.000.000	3,00	18.214.011	25,00	20,24	[TW1 - Pendorong] Pencairan dilaksanakan setiap bulan	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.01.2,08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	15.000.000	3,00	4.140.000	25,00	27,60	[TW1 - Pendorong] Pencairan sesuai dengan rencana kas	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.01.2,08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	161.000.000	3,00	39.174.500	25,00	24,33	[TW1 - Pendorong] Pencairan sesuai dengan rencana kas	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.01.2,09	Tersusunnya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang [Laporan]	12,00	696.518.406	3,00	71.766.500	25,00	10,30	[TW1 - Pendorong]Kegiatan tersebut merupakan pemenuhan kegiatan rutin kantor, untuk capaian fisik mengikuti kebutuhan per bulan	[TW2]Kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran kas
1.06.01.2,09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	22,00	360.580.000	2,00	71.766.500	9,09	19,90	[TW1 - Penghambat] Sesuai dengan kebutuhan di triwulan I dan anggaran tersebut di refocusing	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.01.2,09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	4,00	335.938.406	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Sebagian Anggaran Pemeliharaan gedung dan rehabilitasi gedung di refocusing	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
Rata-rata capaian kinerja (%)						100,00	23,17	25,00	23,17		
Predikat kinerja						ST	SR	SR	SR		
1.06.02	PSKS yang Aktif secara Individu, Keluarga dan Lembaga	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif secara indovidu, keluarga dan lembaga [%]	100,00	580.000.000	25,00	78.508.500	25,00	13,54	[TW1 - Penghambat] Rencana kegiatan akan dilaksanakan akhir di triwulan 1	[TW2] Kegiatan akan dilaksankan di triwulan berikutnya

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
						I					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.02.2,02	Terlaksananya sosialisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh masyarakat yang mengikuti sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) [Orang]	100,00	15.000.000	25,00	2.637.000	25,00	17,58	[TW1 - Penghambat] Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II	[TW2] Pelaksanaan Kegiatan sesuai Permensos No. 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan UGB
1.06.02.2,02.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang [Dokumen]	1,00	15.000.000	0,00	2.637.000	0,00	17,58	[TW1 - Penghambat] Kegiatan di laksanakan di Triwulan II	[TW2] Pelaksanaan Kegiatan sesuai Permensos No.4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan UGB
1.06.02.2,03	Terlaksananya PSKS (TKSK, Karang Taruna, PSM, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tagana, dll) yang mengikuti Diklat.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS (TKSK,Karang Taruna ,PSM, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tagana, dll) yang mengikuti Diklat. [Orang]	459,00	565.000.000	102,00	75.871.500	22,22	13,43	[TW1 - Penghambat] Rencana kegiatan PSKS dan PSM akan dilaksanakan akhir di triwulan 1	[TW2] Kegiatan akan dilaksanakan di Triuwlan berikutnya
1.06.02.2,03.0001		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	120,00	70.000.000	15,00	7.993.500	12,50	11,42	[TW1 - Pendorong] Kegiatan sudah di laksanakan satu kali, yaitu koordinasi Pekerja Sosial masyarakat se- soloraya	[TW2] Pelaksanaan Kegiatan sesuai Permensos No.10 Tahun 2019 tentang PSM
1.06.02.2,03.0002		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	20,00	275.000.000	5,00	47.009.000	25,00	17,09	[TW1 - Penghambat] Pencairan Honor TKSK setiap akhir triwulan	[TW2] Pelaksanaan Kegiatan sesuai Permensos No.28 Tahun 2018 tentang TKSK
1.06.02.2,03.0003		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota [Keluarga]	60,00	20.000.000	15,00	3.048.000	25,00	15,24	[TW1 - Penghambat] Pencairan sesuai dengan anggaran kas	[TW2] Optimalkan, karena masih sangat rendah capaiannya
1.06.02.2,03.0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota [Lembaga]	139,00	155.000.000	27,00	8.685.000	19,42	5,60	[TW1 - Penghambat] Sudah di laksanakan verifikasi di lapangan, proses pembuatan SK bansos	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
						I					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.02.2,03.0005		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota [Sertifikat]	120,00	45.000.000	30,00	9.136.000	25,00	20,30	[TW1 - Pendorong] Kegiatan konsultasi, menerima keluarga yang bermalasah dan memberikan konsultasi	[TW2] Pelaksanaan Kegiatan sesuai Permensos No.25 Tahun 2017 tentang LK3
Rata-rata capaian kinerja (%)						100,00	13,54	25,00	13,54		
Predikat kinerja						ST	SR	SR	SR		
1.06.03	Tertanganinya KTK dan PM bermasalah yang mendapatkan penanganan	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase KTK dan PM bermasalah yang mendapatkan penanganan [%]	100,00	150.000.000	25,00	5.015.000	25,00	3,34	[TW1 - Penghambat] Proses verifikasi di lapangan untuk Penerima Bansos,Proses pembuatan SK bansos	[TW2] Segera koordinasi dengan bagian hukum untuk proses pembuatan SK bansos
1.06.03.2,01	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Korban Tindak Kekerasan(KTK) dan Pekerja Migran (PM) bermasalah yang di tangani [Orang]	30,00	150.000.000	15,00	5.015.000	50,00	3,34	[TW1 - Penghambat] Proses verifikasi di lapangan untuk Penerima Bansos	[TW2] Segera koordinasi dengan bagian hukum untuk proses pembuatan SK Bansos
1.06.03.2,01.0001		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	30,00	150.000.000	15,00	5.015.000	50,00	3,34	[TW1 - Penghambat]Proses Pembuatan SK Bansos	[TW2]Pencairan Bansos sesuai SK Bupati Sragen No : 400.9.14.5/182/01.3/2024 Tentang Penerima dan Alokasi Belanja Bantuan Sosial Tahap Kesatu Fasilitasi Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024
Rata-rata capaian kinerja (%)						100,00	3,34	25,00	3,34		
Predikat kinerja						ST	SR	SR	SR		
1.06.04	Terehabilitasinya PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti [%]	100,00	2.048.739.000	25,00	137.192.000	25,00	6,70	[TW1 - Penghambat] Program rehabilitasi sosial untuk penerima bansos dalam tahap verifikasi lapangan dan proses pembuatan SK	[TW2] Segera melengkapi administrasi

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
						I					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.04.2,01	Terehabilinasinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)(Lansia terlantar,anak terlantar, bermasalah dengan hukum, berkebutuhan khusus), Penyandang Disabilitas, tuna sosial, PGOT) yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)(Lansia terlantar,anak terlantar, bermasalah dengan hukum, berkebutuhan khusus), Penyandang Disabilitas, tuna sosial, PGOT,) yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti [Orang]	2.195,00	1.648.165.000	470,00	91.186.000	21,41	5,53	bansos [TW1 - Penghambat] Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas dan lansia untuk Penerima Bansos dalam tahap verval di lapangan dan proses pembuatan SK, kegiatan ini juga bekerjasama dengan LKS dalam penyaluran PM	[TW2] Agar di selesaikan sesuai rencana kegiatan
1.06.04.2,01.0001		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	150,00	150.000.000	38,00	15.660.000	25,33	10,44	[TW1 - Penghambat] Pencairan sesuai dengan Penerima manfaat di rumah singgah dan sebagian anggaran di refocusing	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.04.2,01.0002		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	205,00	45.000.000	38,00	0	18,54	0,00	[TW1 - Penghambat] Pencairan sesuai anggaran kas dan sebagian anggaran di refocusing	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.04.2,01.0003		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	20,00	125.000.000	5,00	2.075.000	25,00	1,66	[TW1 - Penghambat] Pencairan sesuai dengan anggaran kas	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.04.2,01.0004		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	95,00	105.000.000	24,00	7.407.000	25,26	7,05	[TW1 - Pendorong] Adanya alat biometrik membantu mempercepat proses reunifikasi keluarga	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.04.2,01.0005		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	450,00	175.000.000	113,00	20.640.500	25,11	11,79	[TW1 - Pendorong] Pelayanan bimbingan, edukasi dan sosialisasi kepada anak-anak rentan disekolah melalui kegiatan PGTS dan Pendampingan penyandang disabilitas	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
						I					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.04.2,01.0006		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	382,00	105.883.000	38,00	0	9,95	0,00	[TW1 - Pendorong] Memaksimalkan Sosialisasi tentang penanganan ODGJ	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.04.2,01.0007		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	10,00	15.000.000	1,00	0	10,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Kegiatan belum dilaksanakan	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.04.2,01.0008		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	303,00	142.282.000	76,00	7.364.500	25,08	5,18	[TW1 - Penghambat] Pencairan sesuai dengan anggaran kas, untuk honor Tenaga Kesehatan di Rumah Singgah	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.04.2,01.0009		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	100,00	50.000.000	25,00	0	25,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Kegiatan tersebut belum di laksanakan dan sebagian anggaran di refocusing	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.04.2,01.0010		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	345,00	540.000.000	80,00	14.153.000	23,19	2,62	[TW1 - Penghambat]Telah di laksanakan proses verifikasi di lapangan bagi penerima PM, untuk selanjutnya adalah tahap pembuatan SK bansos	[TW2]Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.04.2,01.0011		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	20,00	10.000.000	6,00	0	30,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Pencairan sesuai anggaran kas	[TW2] Di laksanakan sesuai anggaran kas
1.06.04.2,01.0012		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	115,00	185.000.000	26,00	23.886.000	22,61	12,91	[TW1 - Penghambat] Kesulitan dalam mencari panti sosial sebagai tempat rujukan dan belum tersedianya SDM	[TW2] Mencari jejaring panti sosial swasta

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.04.2,02	Terehabilitasinya PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti [Orang]	650,00	400.574.000	210,00	46.006.000	32,31	11,49	[TW1 - Penghambat] Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza untuk Penerima Bansos dalam tahap verval di lapangan dan proses pembuatan SK, kegaiaian ini juga bekerjasama dengan LKS dalam penyaluran PM	[TW2] Agar diselesaikan sesuai rencana
1.06.04.2,02.0007		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	650,00	400.574.000	210,00	46.006.000	32,31	11,49	[TW1 - Penghambat] Kegiatan ini dilaksanakan sesuai anggaran kas dan sesuai jadwal hari jadi disabilitas dan HLUN	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
Rata-rata capaian kinerja (%)						100,00	6,70	25,00	6,70		
Predikat kinerja						ST	SR	SR	SR		
1.06.05	Tertanganinya PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial [%]	100,00	7.301.574.000	25,00	1.613.900.800	25,00	22,10	[TW1 - Penghambat] Program ini sesuai mandat Kemensos untuk Perlindungan Sosial dan Pemberian bantuan	[TW2] Agar diselesaikan sesuai rencana kegiatan

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.05.2,02	Tertanganinya Penerima Manfaat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional Bantuan sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), RTLH, Fakir Miskin, Santunan Duka Cita yang masuk DTKS dan jumlah Operator desa/keluarahan yang mengikuti Verifikasi dan validasi data Fakir Miskin, Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai bagi Fakir Miskin, Jumlah SDM Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) ,Jumlah Survei Saraswati, jampersal,RTLH,biasiswa bagi Masyarakat Miskin (UPT-PK), Jumlah BLT bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok [Orang]	3.033,00	7.301.574.000	3.465,00	1.613.900.800	114,24	22,10	[TW1 - Penghambat] Kegiatan verifikasi dan validasi data sebagai walidata dalam pemberian bansos dan pemberdayaan masyarakat	[TW2] Agar diselesaikan sesuai rencana kegiatan
1.06.05.2,02.0002		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota [Keluarga]	2.067,00	854.574.000	290,00	75.295.500	14,03	8,81	[TW1 - Penghambat] Proses pengajuan SPJ dan sebagian anggaran di refocusing	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.05.2,02.0003		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota [Keluarga]	10.121,00	5.690.400.000	3.135,00	1.537.005.300	30,98	27,01	[TW1 - Pendorong] Sosialisasi Penerima Bantuan Langsung Tunai bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau sudah di laksanakan	[TW2] Proses Pembuatan MOU dengan PT.Pos
1.06.05.2,02.0004		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	140,00	756.600.000	40,00	1.600.000	28,57	0,21	[TW1 - Penghambat] Proses pembuatan SK bansos	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
Rata-rata capaian kinerja (%)						100,00	22,10	25,00	22,10		
Predikat kinerja						ST	SR	SR	SR		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
						I					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.06	Tertanganinya Korban Bencana Alam dan bencana Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan bencana sosial yang mendapatkan pelayanan [%]	100,00	215.000.000	25,00	16.942.000	25,00	7,88	[TW1 - Penghambat]Program ini memberikan pelayanan bagi Korban bencana alam dan alam dengan memberikan Bantuan Tidak Terduga sesuai Perbup No. 114 th 2022 tentang Pengelolaan BTT	[TW2]Agar diselesaikan sesuai rencana kegiatan
1.06.06.2,01	Tertanganinya Korban bencana Alam dan Bencana Sosial pasca tanggap darurat bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase (%) Korban bencana Alam dan Bencana Sosial yang ditangani [%]	100,00	125.000.000	25,00	13.231.000	25,00	10,58	[TW1 - Penghambat] Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial dengan cara Pemberian Permakanan, Bantuan Tidak Terduga, dan Dukungan Psikososial	[TW2] Agar diselesaikan sesuai rencana
1.06.06.2,01.0001		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	50,00	30.000.000	13,00	6.740.000	26,00	22,47	[TW1 - Penghambat] Proses Penunjukan Rekanan Penyedia	[TW2] Melengkapi pengadministrasian keuangan (SPJ) dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.06.2,01.0002		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	50,00	25.000.000	13,00	0	26,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Proses Penunjukan Rekanan Penyedia	[TW2] Melengkapi pengadministrasian keuangan (SPJ) dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.06.2,01.0003		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota [Unit]	2,00	10.000.000	0,00	13.000	0,00	0,13	[TW1 - Penghambat] Pencairan sesuai anggaran kas	[TW2] optimalkan, karena masih sangat rendah capaiannya

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
						I					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.06.2,01.0004		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	40,00	35.000.000	13,00	6.018.000	32,50	17,19	[TW1 - Penghambat] Kejadian yang tidak bisa di prediksi karena bencana termasuk kejadian alam	[TW2] Melengkapi pengadministrasian keuangan (SPJ) dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.06.2,01.0005		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	150,00	25.000.000	38,00	460.000	25,33	1,84	[TW1 - Penghambat] Pencairan sesuai anggaran kas	[TW2] optimalkan, karena masih sangat rendah capaiannya
1.06.06.2,02	Terfasilitasinya Tagana yang mengikuti kegiatan Evakuasi Bencana Alam dan Sosial dan Koordinasi bencana alam dan sosial	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tagana yang mengikuti kegiatan Evakuasi Bencana Alam dan Sosial dan Koordinasi bencana alam dan sosial [Orang]	40,00	90.000.000	10,00	3.711.000	25,00	4,12	[TW1 - Penghambat] Kegiatan evakuasi bencana tidak bisa diprediksi	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.06.2,02.0001		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota [Kampung]	3,00	60.000.000	1,00	3.711.000	33,33	6,19	[TW1 - Penghambat] Pencairan sesuai anggaran kas	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
1.06.06.2,02.0002		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	40,00	30.000.000	10,00	0	25,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Kegiatan evakuasi bencana tidak bisa diprediks	[TW2] Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan KAK
Rata-rata capaian kinerja (%)						100,00	7,88	25,00	7,88		
Predikat kinerja						ST	SR	SR	SR		
1.06.07	Terpeliharanya TMP yang dikelola (Dirawat) dan di rehabilitasi	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola [%]	100,00	104.995.342	25,00	3.331.000	25,00	3,17	[TW1 - Penghambat] Kegiatan dilaksanakan di hari-hari besar nasional dan keagamaan	[TW2] Optimalkan karena capaian masih rendah
1.06.07.2,01	Terpeliharanya TMP yang terawat dan terehabiliasti	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam terpenuhinya pemeliharaan TMP yang terawat [Makam]	1,00	104.995.342	1,00	3.331.000	100,00	3,17	[TW1 - Penghambat] Kegiatan dilaksanakan di hari-hari besar nasional dan keagamaan	[TW2] Kegiatan dilaksanakan sesuai petunjuk

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	I		K	Rp		
						K	Rp				
1.06.07.2,01.0001		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota [Dokumen]	1,00	54.995.342	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Pencairan sesuai dengan anggaran kas, Triwulan II	[TW2] Optimalkan, karena masih sangat rendah capaiannya
1.06.07.2,01.0002		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota [Makam]	1,00	50.000.000	1,00	3.331.000	100,00	6,66	[TW1 - Penghambat] Kegiatan hari besar di mulai bulan April	[TW2] Di laksanakan sesuai petunjuk
Rata-rata capaian kinerja (%)						100,00	3,17				
Predikat kinerja						ST	SR				

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan yang tingkat realisasi kinerja dibawah 25%, yaitu;

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Mebel
5. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Atau Barang
12. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
13. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
14. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
15. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
16. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debrakasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
17. Penyediaan Permakanan
18. Penyediaan Sandang
19. Penyediaan Alat Bantu
20. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
21. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spirirtual dan Sosial
22. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
23. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
24. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

25. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
26. Pemberian Layanan Kedaruratan
27. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
28. Pemberian Layanan Rujukan
29. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
30. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
31. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
32. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
33. Penyediaan Makanan
34. Penyediaan sandang
35. Penyediaan tempat penampungan pengungsi
36. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
37. Pelayanan Dukungan Psikososial
38. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
39. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
40. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
41. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Dalam penetapan APBD 2025, Dinas Sosial Kabupaten Sragen mendapatkan anggaran penetapan sebesar Rp. 17.359.699.621, terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp.5.314.841.473, belanja barang jasa sebesar Rp.9.559.393.000, Belanja Bantuan sosial Rp.1.596.000.000, belanja modal Peralatan dan mesin Rp. 476.399.400, dan Belanja modal gedung dan bangunan Rp. 388.065.748 serta belanja modal aset lainnya Rp. 25.000.000

Sampai akhir triwulan I, realisasi anggaran sudah mencapai Rp. 3.472.005.825 atau 20% (Belanja Pegawai Rp. 1.430.662.514, Belanja Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.041.343.311, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 0. Ada beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya masih rendah, di bawah 25% karena kegiatan tersebut direncanakan dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV

Beberapa kebijakakan/tindakan yang perlu diambil untuk evaluasi terhadap program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dengan mempertimbangkan kemampuan Perangkat Daerah sehingga target kinerja sampai dengan Triwulan IV bisa tercapai;
2. Melakukan evaluasi terhadap rencana penyerapan anggaran;

3. Melakukan evaluasi terhadap alokasi pagu anggaran sebelumnya agar efisiensi anggaran tercapai.

2.2 Evaluasi Kinerja Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah tahun 2024

Evaluasi atau capaian kinerja tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah tahun 2024 dapat di lihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.2
Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN			
				TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (%)	KATEGORI
1.	Meningkatkan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) miskin yang ditangan	Presentase meningkatnya keberdayaan PPKS	%	90	99,02	110,02	Sangat Baik
2.	Meningkatnya keberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Presentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang di tangani	%	77	87,01	113	Sangat Baik

Analisa capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2024, berdasarkan table 2.2 pada capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2024, maka dapat di analisa sebagai berikut :

Pada table di atas dapat diketahui pencapaian dari tujuan dan sasaran Dinas Sosial kabupaten Sragen dengan kategor Sangat baik. Denga begitu dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial kabupaten Sragen Tahun 2024 sudah sangat baik.

2.3. Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sragen

Analisis kinerja pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Sragen bisa di lihat dari dibawah ini Tabel 2.3 Pencapaian Perubahan Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sragen sebagaimana di halaman berikut adalah :

Tabel 2.3
Pencapaian Perubahan Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sragen

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (TW. I)	2024	2025	2026	
					target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(14)	(9)	(10)	(11)	(14)	(14)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase (%) PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti													
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)(Lansia terlantar,anak terlantar, bermasalah dengan hukum, berkebutuhan khusus), Penyandang Disabilitas, tuna sosial, PGOT) yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti													
			Layanan data dan pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	95	994	429	340	50	95	994	429	85	429	340	50	
			Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	50	908	75	50	40	50	908	20	908	75	50	
			Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan	95	21	50	550	50	95	21	50	138	50	550	50	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (TW. I)	2024	2025	2026	
					target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(14)	(9)	(10)	(11)	(14)	(14)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	95	21	25	25	50	95	21	25	10	25	25	50	
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	95	111	139	60	20	95	111	139	15	139	60	20	
			Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan Kabupaten/Kota	95	994	139	150	50	95	994	139	38	139	150	50	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	681	565	469	150	25	681	565	121	565	469	150	
			Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	95	681	290	250	50	95	681	290	68	290	250	50	
			Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	95	994	1	2	5	95	994	1	1	1	2	5	
			Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25	212	215	150	150	25	212	215	38	215	150	150	
			Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	95	994	54	5	994	95	994	54	5	54	20	5	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (TW. I)	2024	2025	2026	
					target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(14)	(9)	(10)	(11)	(14)	(14)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	95	994	2	5	994	95	994	2	2	2	5	5	
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	30	50	15	15	30	30	50	3	50	15	15	
2	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase (%) PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti													
			<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti</i>													
			Layanan data dan pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	334	181	330	10	20	334	181	75	181	330	10	
			Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	334	181	300	10	20	334	181	75	181	300	10	
			Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20	334	551	300	10	20	334	551	75	551	300	10	
			Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20	334	551	300	10	20	334	551	75	551	300	10	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (TW. I)	2024	2025	2026	
					target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(14)	(9)	(10)	(11)	(14)	(14)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	309	181	300	300	20	309	181	75	181	300	300	
			Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan Kabupaten/Kota	20	334	100	300	10	20	334	100	75	100	300	10	
			Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20	309	181	300	10	20	309	181	75	181	300	10	
			Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20	2	15	4	5	20	2	15	1	15	4	5	
			Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	20	9	100	300	10	20	9	100	75	100	300	10	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20	9	27	15	25	20	9	27	5	27	15	25	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	16	9	5	10	10	16	9	2	9	5	10	
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	5	18	10	0	10	5	18	3	18	10	10	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (TW. I)	2024	2025	2026	
					target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(14)	(9)	(10)	(11)	(14)	(14)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase (%) PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti													
			<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)(Lansia terlantar,anak terlantar, bermasalah dengan hukum, berkebutuhan khusus), Penyandang Disabilitas, tuna sosial, PGOT) yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti</i>													
			Layanan data dan pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	160	463	195	215	175	160	463	195	55	195	215	175	
			Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	160	205	195	200	175	160	205	195	50	195	200	175	
			Penyediaan permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	463	195	175	175	100	463	195	44	195	175	175	
			Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100	463	195	175	175	100	463	195	44	195	175	175	
			Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	160	463	195	175	175	160	463	195	44	195	175	175	
			Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan Kabupaten/Kota	160	463	309	300	175	160	463	309	75	309	300	175	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (TW. I)	2024	2025	2026	
					target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(14)	(9)	(10)	(11)	(14)	(14)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	250	453	300	175	100	250	453	75	453	300	175	
			Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	250	5	40		100	250	5	11	5	40		
			Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	160	5	1	4	10	160	5	1	1	1	4	10	
			Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	160	463	309	300	175	160	463	309	75	309	300	175	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	160	1	5	15	10	160	1	5	5	5	15	10	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	1	2	5	10	50	1	2	2	2	5	10	
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	7	3	10	10	50	7	3	3	3	10	10	
4	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase (%) PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti													

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (TW. I)	2024	2025	2026	
					target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(14)	(9)	(10)	(11)	(14)	(14)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)(Lansia terlantar,anak terlantar, bermasalah dengan hukum, berkebutuhan khusus), Penyandang Disabilitas, tuna sosial, PGOT) yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti</i>													
			Layanan data dan pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	427	226	226	150	150	427	226	226	38	226	150	150	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	427	226	226	150	100	427	226	226	38	226	150	100	
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	102	266	226	150	100	102	266	226	38	226	150	100	
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	102	226	226	150	150	102	226	226	38	226	150	150	
			Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	427	226	226	150	150	427	226	226	38	226	150	150	
			Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan Kabupaten/Kota	427	226	226	150	150	427	226	226	38	226	150	150	
			Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	102	226	226	150	150	102	226	226	38	226	150	150	
			Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	427	10	15	2	5	427	10	15	1	15	2	5	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (TW. I)	2024	2025	2026	
					target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(14)	(9)	(10)	(11)	(14)	(14)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	427	50	226	150	150	427	50	226	38	226	150	150	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	427	226	226	150	20	427	226	226	38	226	150	20	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	71	159	154	80	80	71	159	154	20	154	80	80	
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	67	69	80	80	50	67	69	20	69	80	80	
5	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase (%)Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang mendapatkan penanganan													
			<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	<i>Prosentase (%) Korban bencana Alam dan Bencana Sosial yang ditangani</i>													
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	16	59	50	50	50	16	59	50	13	50	50	50	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (TW. I)	2024	2025	2026	
					target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(14)	(9)	(10)	(11)	(14)	(14)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	24	59	53	50	50	24	59	53	13	53	50	50	
			Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	102	2	2	1	1	102	1	102	2	2	
			Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	59	53	50	50	40	59	53	13	53	50	50	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	80	59	150	150	150	80	59	150	38	150	150	150	

2.4. Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Dinas Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk menjadi suatu Rencana Kerja (Renja OPD) setiap tahunnya usulan-usulan kegiatan dalam Renja OPD selain kegiatan yang merupakan penjabaran sesuai tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Sragen juga diperoleh dari program dan usulan dari para pemangku kepentingan ataupun stakeholder Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang dilakukan penjaringan lewat musrenbang desa, musrenbang kecamatan, dan musrebang Kabupaten yang difasilitasi oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Sragen.

Adapun realisasi usulan dari Pokok-Pokok Pikiran Dewan disampaikan dalam musrenbang kabupaten dan diperoleh dalam masa reses yang diinput dalam mekanisme tersendiri dalam SIPD, semuanya tertampung pada tabel 2.5 sebagai berikut ini.

Tabel 2.4
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Sragen

Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Besaran / Volume (Penetapan)	Besaran / Volume (Perubahan)	Catatan
			Tolok Ukur	Keluaran			
1.	Program Perlindungan Jaminan Sosial/Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota/ Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Sragen	Jumlah PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (orang)	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	137 PRSE	6 PRSE	Pokok-Pokok Pikiran Dewan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja

Dasar penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan turunan dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 dengan target capaian utama adalah terwujudnya kesejahteraan melalui Pembangunan Bidang Sosial. Disamping mempertimbangkan beberapa target / capaian Pemerintah Pusat, Propinsi dimana salah satunya adalah isu pengurangan jumlah penduduk miskin.

Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang menjadi skala prioritas guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2025 Kabupaten Sragen adalah dalam Misi Ke - 5 dari Visi Misi Bupati Sragen yaitu Meningkatkan Kesejahteraan dan Kebahagiaan Hidup Warga.

Dari Visi ke 5 tersebut di implementasikan di Dinas Sosial Kabupaten Sragen sebagai tujuan OPD yaitu Meningkatkan kemandirian sosial PPKS melalui pemberdayaan, dengan sasaran Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang diberdayakan.

Dana Indikatif Berdasarkan Pagu Indikatif Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 pada tabel 3.1 sebagai berikut:

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025
NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

Kode Rekening	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Penetapan 2025		Bertambah / Berkurang (Refocusing) 2025	Pagu Refocusing 2025		Bertambah / Berkurang 2025	Pagu Perubahan 2025	
			Target	Plafon		Target	Plafon		Target	Plafon
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.359.699.621	1.148.738.886		16.210.960.735	-292.850.000		15.918.110.735
01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase (%) PSKS yang Aktif secara Individu, Keluarga dan Lembaga	100	580.000.000	74.146.750	100	505.853.250		100	505.853.250
1.06.02.2.02	<i>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>	100	15.000.000	2.925.000	100	12.075.000		100	12.075.000
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1	15.000.000	2.925.000	1	12.075.000		1	12.075.000
1.06.02.2.03	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah PSKS (TKSK, Karang Taruna, PSM, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tagana, dll) yang mengikuti Diklat.</i>	399	565.000.000	71.221.750	399	493.778.250		399	493.778.250
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan)- Penunjang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60	70.000.000	22.575.000	60	47.425.000		60	47.425.000
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20	275.000.000	7.785.000	20	267.215.000		20	267.215.000
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan kemampuan potensi sumber Kesejahteraan Sosial keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - Langsung	Jumlah Keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	60	20.000.000	4.220.000	60	15.780.000		60	15.780.000
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - Penunjang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	139	155.000.000	26.083.000	139	128.917.000		139	128.917.000
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	120	45.000.000	10.558.750	120	34.441.250		120	34.441.250
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase (%) KTK dan PM bermasalah yang mendapatkan penanganan	100	150.000.000	5.033.750	100	144.966.250		100	144.966.250

Kode Rekening	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Penetapan 2025		Bertambah / Berkurang (Refocusing) 2025	Pagu Refocusing 2025		Bertambah / Berkurang 2025	Pagu Perubahan 2025	
			Target	Plafon		Target	Plafon		Target	Plafon
1.06.03.2.01	<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</i>	<i>Jumlah Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Pekerja Migran (PM) bermasalah yang di tangani</i>	30	150.000.000	5.033.750	30	144.966.250		30	144.966.250
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	30	150.000.000	5.033.750	30	144.966.250		30	144.966.250
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase (%) PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100	2.048.739.000	367.846.870	100	1.680.892.130	30.000.000	100	1.710.892.130
1.06.04.2.01	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)(Lansia terlantar,anak terlantar, bermasalah dengan hukum, berkebutuhan khusus), Penyandang Disabilitas, tuna sosial, PGOT) yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti</i>	2.195	1.648.165.000	329.845.750	2.195	1.318.319.250	30.000.000	2.215	1.348.319.250
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang SPM), (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150	150.000.000	7.920.000	150	142.080.000		150	142.080.000
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang SPM), (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	205	45.000.000		205	45.000.000		205	45.000.000
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang SPM), (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	125.000.000		20	125.000.000		20	125.000.000
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang SPM), (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	95	105.000.000	23.466.000	95	81.534.000		95	81.534.000
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang SPM), (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	450	175.000.000	77.034.000	450	97.966.000	30.000.000	470	127.966.000
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat(Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang SPM), (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	382	105.883.000	58.077.000	382	47.806.000		382	47.806.000

Kode Rekening	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Penetapan 2025		Bertambah / Berkurang (Refocusing) 2025	Pagu Refocusing 2025		Bertambah / Berkurang 2025	Pagu Perubahan 2025	
			Target	Plafon		Target	Plafon		Target	Plafon
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang SPM), (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10	15.000.000	7.968.750	10	7.031.250		10	7.031.250
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang SPM), (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	303	142.282.000	70.570.000	303	71.712.000		303	71.712.000
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang SPM), (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	50.000.000	11.464.000	100	38.536.000		100	38.536.000
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang SPM), (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	345	540.000.000	15.675.000	345	524.325.000		345	524.325.000
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang SPM), (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	10.000.000	3.700.000	20	6.300.000		20	6.300.000
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang SPM), (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	115	185.000.000	53.971.000	115	131.029.000		115	131.029.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti	650	400.574.000	38.001.120	650	362.572.880		650	362.572.880
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	650	400.574.000	38.001.120	650	362.572.880		650	362.572.880
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase (%) PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	7.301.574.000	205.624.250	100	7.095.949.750	25.200.000	100	7.121.149.750

Kode Rekening	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Penetapan 2025		Bertambah / Berkurang (Refocusing) 2025	Pagu Refocusing 2025		Bertambah / Berkurang 2025	Pagu Perubahan 2025	
			Target	Plafon		Target	Plafon		Target	Plafon
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional Bantuan sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), RTLH, Fakir Miskin, Santunan Duka Cita yang masuk DTKS dan jumlah Operator desa/kelurahan yang mengikuti Verifikasi dan validasi data Fakir Miskin, Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai bagi Fakir Miskin, Jumlah SDM Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Jumlah Survei Saraswati, jampersal, RTLH, beasiswa bagi Masyarakat Miskin (UPT-PK), Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu	12.356	7.301.574.000	205.624.250	12.356	7.095.949.750	25.200.000	16.618	7.121.149.750
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	2067	854.574.000	156.911.400	2067	697.662.600		2067	697.662.600
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga , (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10121	5.690.400.000	48.212.850	10121	5.642.187.150		14383	5.642.187.150
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	168	756.600.000	500.000	168	756.100.000	25.200.000	168	781.300.000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase (%)Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang mendapatkan penanganan	100	215.000.000	38.099.500	100	176.900.500	15.000.000	100	191.900.500
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase (%) Korban bencana Alam dan Bencana Sosial yang ditangani	100	125.000.000	16.210.500	100	108.789.500		100	108.789.500
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang SPM),(PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan)- langsung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50	30.000.000	3.135.000	50	26.865.000		50	26.865.000
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan sandang (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang SPM), (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50	25.000.000		50	25.000.000		50	25.000.000
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang SPM), (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - Tidak langsung	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2	10.000.000		2	10.000.000		2	10.000.000
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang SPM), (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	35.000.000	5.485.500	50	29.514.500		50	29.514.500

Kode Rekening	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Penetapan 2025		Bertambah / Berkurang (Refocusing) 2025	Pagu Refocusing 2025		Bertambah / Berkurang 2025	Pagu Perubahan 2025	
			Target	Plafon		Target	Plafon		Target	Plafon
1.06.06.2.01.0005	<i>Pelayanan Dukungan Psikososial (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang SPM), (PMK No. 97 Th 2023 tentang Pengentasan Kemiskinan) - langsung</i>	<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	150	25.000.000	7.590.000	150	17.410.000		150	17.410.000
1.06.06.2.02	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Tagana yang mengikuti kegiatan Evakuasi Bencana Alam dan Sosial dan Koordinasi bencana alam dan sosial</i>	40	90.000.000	21.889.000	40	68.111.000	15.000.000	190	83.111.000
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3	60.000.000	18.889.000	3	41.111.000		3	41.111.000
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40	30.000.000	3.000.000	40	27.000.000	15.000.000	190	42.000.000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentasi (%) TMP yang dikelola (Dirawat)	100	104.995.342	55.922.842	100	49.072.500		100	49.072.500
1.06.07.2.01	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah makam terpenuhinya pemeliharaan TMP yang terawat</i>	1	104.995.342	55.922.842	1	49.072.500		1	49.072.500
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	54.995.342	54.995.342	1	-		1	-
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	50.000.000	927.500	1	49.072.500		1	49.072.500
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase Ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	6.959.391.279	402.064.924	100	6.557.326.355	-363.050.000	100	6.194.276.355
1.06.01.02.01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu.</i>	7	33.500.000	1.833.000	7	31.667.000		7	31.667.000
1.06.01.02.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	10.000.000	1.833.000	2	8.167.000		2	8.167.000
1.06.01.02.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.000.000		1	5.000.000		1	5.000.000
1.06.01.02.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	18.500.000		4	18.500.000		4	18.500.000
1.06.01.02.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah</i>	12	5.324.841.473		12	5.324.841.473	-363.050.000	12	4.961.791.473
1.06.01.02..02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	5.314.841.473		35	5.314.841.473	-363.050.000	40	4.951.791.473
1.06.01.02.02.0002	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	5	5.000.000		5	5.000.000		5	5.000.000

Kode Rekening	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Penetapan 2025		Bertambah / Berkurang (Refocusing) 2025	Pagu Refocusing 2025		Bertambah / Berkurang 2025	Pagu Perubahan 2025	
			Target	Plafon		Target	Plafon		Target	Plafon
1.06.01.02.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5.000.000		5	5.000.000		5	5.000.000
1.06.01.03.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dikerjakan	1	5.000.000		1	5.000.000		1	5.000.000
1.06.01.03.0001	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	5.000.000		1	5.000.000		1	5.000.000
1.06.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12	160.000.000	58.000.000	12	102.000.000		12	102.000.000
1.06.01.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	5.000.000		12	5.000.000		12	5.000.000
1.06.01.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	15.000.000		12	15.000.000		12	15.000.000
1.06.01.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	25.000.000	8.000.000	12	17.000.000		12	17.000.000
1.06.01.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	15.000.000		12	15.000.000		12	15.000.000
1.06.01.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	100.000.000	50.000.000	12	50.000.000		12	50.000.000
1.06.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	13	473.531.400		13	473.531.400	- 36.782.000	13	436.749.400
1.06.01.07.0005	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang di sediakan</i>								-
1.06.01.07.0006	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	385.000.000		1	385.000.000	- 31.000.000	1	354.000.000
1.06.01.07.0007	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	88.531.400		13	88.531.400	- 5.782.000	13	82.749.400
1.06.01..02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	12	266.000.000	5.000.000	12	261.000.000	31.000.000	12	292.000.000
1.06.01.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	90.000.000		12	90.000.000	31.000.000	12	121.000.000
1.06.01.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	15.000.000		12	15.000.000		12	15.000.000
1.06.01.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	161.000.000	5.000.000	12	156.000.000		12	156.000.000
1.06.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	12	696.518.406	337.231.924	12	359.286.482	5.782.000	12	365.068.482

Kode Rekening	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Penetapan 2025		Bertambah / Berkurang (Refocusing) 2025	Pagu Refocusing 2025		Bertambah / Berkurang 2025	Pagu Perubahan 2025	
			Target	Plafon		Target	Plafon		Target	Plafon
1.06..01.02.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	360.580.000	51.980.000	22	308.600.000	5.782.000	22	314.382.000
1.06..01.02.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Rehab Lantai Dinas Sosial, Pemeliharaan Rumah Singgah, Pemeliharaan Gedung Lansia, Pemeliharaan Gedung Graha Inklusi)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	335.938.406	285.251.924	4	50.686.482		4	50.686.482
TOTAL				17.359.699.621	1.148.738.886		16.210.960.735	-292.850.000		15.918.110.735

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sragen

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalah indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dalam Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tahun 2025 adalah masa transisi dari dokumen perencanaan strategis tahun 2021-2026 menjadi dokumen perencanaan strategis tahun 2025-2029, maka dokumen perencanaan perubahan tahun 2025 menyajikan tujuan, sasarn berikut ini indikator pada dua periode sebagaimana table berikut ini :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026
Dinas Sosial Kabupaten Sragen

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) miskin yang di tangani	Persentase meningkatnya keberdayaan PPKS	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam upaya mendukung penanganan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah PPKS Miskin yang ditangani}}{\text{Jumlah Total PPKS Miskin Terdata}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Sosial dan Aplikasi SIKS-NG dari Kementerian Sosial
1.1	Meningkatnya keberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Alasan Pemilihan Indikator: - Pelaksanaan dasar Bidang Sosial adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Dinas Sosial adalah pelayanan wajib dasar di Bidang Sosial. - UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa pelayanan di Dinas Sosial adalah PPKS (26 jenis PPKS termasuk fakir miskin). Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah PPKS yang ditangani}}{\text{Jumlah Total PPKS Terdata}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Sosial dan Aplikasi SIKS-NG dari Kementerian Sosial

Tabel 3.3
 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029
 Dinas Sosial Kabupaten Sragen

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kemandirian sosial PPKS melalui pemberdayaan	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang diberdayakan	% (persen)	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih karena mampu memberikan gambaran terhadap pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial dalam pemberdayaan PPKS untuk mendukung penanganan kemiskinan di Kabupaten Sragen Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah PPKS yang diberdayakan}}{\text{Jumlah Total PPKS Terdata}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan: Kumulatif Penanggungjawab: Dinas Sosial Kabupaten Sragen Sumber Data: Dinas Sosial dan Aplikasi SIKS-NG dari Kementerian Sosial
1.2	Meningkatkan cakupan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS	Persentase PPKS yang Mendapat Layanan dan Penanganan	% (persen)	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih karena mampu memberikan gambaran terhadap pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial dalam memberikan layanan terhadap PPKS untuk mendukung penanganan kemiskinan di Kabupaten Sragen - Dasar pelaksanaan Bidang Sosial adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Dinas Sosial adalah pelayanan wajib dasar di Bidang Sosial. - UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa pelayanan di Dinas Sosial adalah PPKS (26 jenis PPKS termasuk fakir miskin). Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapat layanan dan penanganan}}{\text{Jumlah Total PPKS Terdata}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan: Kumulatif Penanggungjawab: Dinas Sosial Kabupaten Sragen Sumber Data: Dinas Sosial dan Aplikasi SIKS-NG dari Kementerian Sosial

BAB IV

P E N U T U P

4.1 CATATAN PENTING

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang diatur dalam amanat pasal 360 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Proses penyusunan Perubahan RKPD 2025 berlandaskan prioritas program pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah, sebagaimana tertuang dalam RPJPD dan RPJMD. Perubahan rencana kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Mengacu pada usulan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 terdapat 7 program 16 kegiatan, 52 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 15.918.110.735 (Lima Belas Milyard Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Seratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) maka usulan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang berhasil dirumuskan dalam dokumen ini mencerminkan kerjasama, koordinasi dan integrasi jajaran Dinas Sosial Kabupaten Sragen pada urusan sosial periode Tahun 2021-2026.

Perubahan rencana kerja ini akan dijadikan pedoman/acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan perubahan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh personil Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

4.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Sragen secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan secara tertib, obyektif, dan disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen secara periodic dan berkesinambungan guna mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sragen;

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Perubahan RKA sebelum ditetapkan menjadi DDPA Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen pada tahun 2025 antara lain :

1. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Perubahan Tahun 2025 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Dalam rangka sinergitas penatausahaan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penatausahaan dan asset daerah, harus dilaksanakan lebih insentif, agar proses yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil.

Dengan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 diharapkan pelaksanaan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik, dalam ikut serta Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Sragen, 29 Juli 2025

PII KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SRAGEN


Dra. YUNIARTI, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670620 199403 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS SOSIAL

Jalan R.A. Kartini Nomor 8, Sragen, Jawa Tengah 57212
Telepon (0271) 891043, Fax (0271) 891043 Laman dinsos.sragenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 400.9/ 2022 /09/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Dinas Sosial Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63); dan
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana di maksud dalam lampiran keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
- KEDUA** : Uraian tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
1. Menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025;
 2. Mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025;
 3. Melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025;
 4. Merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025;
 5. Melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025;
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 tepat waktu;
 7. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen selaku Pengguna Anggaran;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana di maksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 25 Juli 2025

Pt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SRAGEN



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. BUPATI Sragen;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;
4. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 400.9 / 2022 / 09 / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dra. Yuniarti, M.H	Plt. Kepala Dinas Sosial	Penanggungjawab
2.	Suharti, SKM, M.Kes	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Arin Dwi Purwantini, ST, MM	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Drs. Catur Edi Meiyanto, MM	Kabid. Pemberdayaan Sosial	Anggota
5.	Kusuma Adi Surya Pamungkas, SE, MM.	Kabid. Rehabilitasi Sosial	Anggota
6.	Drs. Sumarno, M.Si	Kabid. Perlindungan Jaminan Sosial	Anggota
7.	Sahlia, SE, M.Si	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
8.	Tarni Tri Rahayu,S.E.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Ila Aulia Rahmah, A.Md	Pranata Komputer Terampil Dinas Sosial	Anggota

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SRAGEN
YUNIARTI